

BAB IV

ANALISIS HASIL PENELITIAN

A. Analisis Sosiologi Agama Terhadap Konteks Umat Beragama di Porehu

Berdasarkan pemaparan konteks dan kajian teoritis, maka beberapa hal yang dianggap sebagai “lingkaran setan” dalam membina hubungan antar Islam dan Kristen adalah:

Pertama, sikap umat muslim di Porehu pada umumnya masih terbagi atas eksklusivisme maupun inklusivisme. Eksklusivisme yang berkembang dipengaruhi faktor bahwa sebagian dari mereka dahulu adalah bekas anggota Kahar Muzakar yang pada mereka telah telanjur mendapatkan doktrin untuk membentuk sebuah tatanan sosial kemasyarakatan yang bernafaskan Islam dalam artian menjadikan nilai-nilai Islam sebagai landasan dalam kehidupan sehari-hari tanpa memperhatikan aspek kepelbagaian agama. Eksklusivisme yang terbentuk juga tidak dapat dilepaskan dari latar-belakang bahwa mereka pada masa lampau berasal dari agama Kristen. Secara sosiologis dan psikologis orang yang telah beragama baru akan selalu memandang bersalah agama yang telah ditinggalkannya. Bahkan kecenderungannya ialah mereka akan lebih fanatik dari umat yang memang sejak dahulu beragama yang sama.

Inklusivisme yang berkembang pada umat Muslim di Porehu belum sepenuhnya berangkat dari pemahaman di mana umat beragama lain punya jalan sendiri untuk mencapai keselamatan. Sikap inklusif mereka lebih cenderung dipengaruhi oleh faktor kekeluargaan. Oleh karena ada sanak

saudaranya yang beragama Kristen, maka sebagai sesama anggota keluarga menjadi sebuah kewajiban untuk membantu menyediakan rasa aman.

Kedua, ideologi yang telah tertanam dalam benak umat Kristen bahwa daerah yang mereka tempati sebagian besar dihuni oleh bekas tentara Kahar Mudzakar, telah menciptakan ketidaknyamanan. Mereka seolah-olah terus berada dibawa bayang-bayang peristiwa masa lalu sehingga menimbulkan ketakutan yang berujung pada sikap pasrah sembari mengharapkan perubahan akan datang dengan sendirinya. Akibatnya mereka pun cenderung membatasi pergaulan kepada umat Islam. Mereka hanya berani berinteraksi kepada umat Islam tertentu yang dianggap terbuka terhadap keberadaan umat Kristen. Perilaku ini tentu saja kurang baik karena dengan membatasi pergaulan, maka mereka sendiri sedang membatasi perwujudan cita-cita kebebasan beragama dan pendirian rumah ibadah.

Ketiga, faktor ekonomi nampaknya menjadi hal yang sedikit terlupakan bagi umat Kristen dan Islam di Sarambu dan To'Bela (Porehu). Fokus yang terarah pada isu agama telah mengalihkan perhatian dan tidak menyadari bahwa mereka sedang dimanfaatkan oleh para pemilik modal yang berusaha mengambil untung dari suasana yang tidak kondusif.

Keempat, tindakan umat Kristen yang mendukung salah satu pemilik kekuatan politis desa (Kepala Desa); di satu sisi menguntungkan setidaknya dapat memberikan rasa aman selama pemilik kekuasaan memegang kendali atas kehidupan sosial kemasyarakatan. Di sisi lain, mengingat kekuasaan itu hanya temporal atau dalam jangka waktu 5 tahun, maka tindakan yang

dilakukan umat Kristen dapat dikatakan ceroboh sebab justru dapat menimbulkan efek negatif atau menimbulkan persoalan baru ketika pemilik kekuasaan kehilangan pengaruhnya.

Kelima, pemerintah daerah (Kab. Kolaka Utara) yang seharusnya berperan sebagai jembatan antara pemerintah desa dan pusat dalam menyediakan rasa aman bagi warganya, ternyata tidak berperan sebagaimana mestinya. Ketika pemerintah daerah mengatakan dalam sebuah forum bahwa aturan pusat tidak berlaku di daerah, menunjukkan ada upaya dari mereka untuk mempertahankan statusquo. Pernyataan ini sarat dengan muatan politis. Dikatakan demikian mengingat penduduk Kolaka Utara mayoritas umat muslim dengan paham dan aliran Islam yang berbeda-beda disertai dengan latarbelakang masa lalu yang menunjukkan banyak di antara warga muslim merupakan mantan pengikut Kahar Muzakar.

Kenyataan ini, telah membentuk ideologi pemda bahwa situasi yang telah berlangsung sejak dahulu harus terus dipertahankan. Hal ini perlu sebab apabila mereka memberikan celah kepada umat Kristen untuk mendirikan gedung gereja, kekhawatiran akan datangnya tekanan berupa protes dari masyarakat akan sangat besar. Tekanan masyarakat dikuatirkan akan memaksa mereka untuk melepaskan jabatan. Kehilangan jabatan dapat diartikan berhentinya sumber penghasilan mereka.

Lalu bagaimana hubungan antara Pemda dan pemerintah pusat? Pola pikir yang berkembang ialah riak-riak atau suara-suara yang menuntut kebebasan umat beragama secara khusus pembangunan gedung gereja dapat

ditekan. Fakta menunjukkan bahwa umat Kristen di Kolaka Utara tidak memiliki kekuatan politis perjuangannya. Itu berarti peluang mereka sangat kecil untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat umum. Pertimbangan lainnya, umat Kristen tentu tidak akan berani menyampaikan langsung aspirasinya kepada pemerintah pusat mengingat mereka akan dengan mudah dikendalikan, cukup dengan menyebarkan isu atau pun cara lain yang bisa meredam gejolak yang ada. Seperti gayung bersambut, selama ini isu-isu yang ditanggapi pemerintah pusat tentang persoalan di daerah umumnya yang besar atau dapat memicu konflik yang lebih besar. Diperkuat tindakan pemerintah pusat yang hanya memperhatikan aspirasi masyarakat apabila disampaikan oleh pemerintah daerah. Hal itu menunjukkan bahwa pemerintah pusat pun masih bergantung pada pemerintah daerah untuk menyelesaikan dan meredam gejolak yang ada.

B. Menggagas Hubungan Islam dan Kristen yang Inklusif

Dalam upaya mewujudkan pembangunan gedung gereja di Kolaka Utara, maka berangkat dari kasus yang lebih khusus di Kec. Porehu, maka penting dilakukan oleh semua unsur terkait yakni mencoba menyembuhkan luka atau trauma dari umat Kristen tentang peristiwa yang terjadi di masa lampau berkenaan dengan pengrusakan dan pelarangan mereka mendirikan rumah ibadah. Bagi umat Islam, hal yang perlu dilakukan yakni mencoba menghilangkan perasaan negatif mereka tentang umat beragama Kristen serta menekan rasa kekhawatiran yang terlalu besar jika rumah ibadah (gedung

gereja) didirikan. Meyakinkan mereka bahwa pembangunan gedung gereja bukanlah usaha untuk mengkristenkan Kolaka Utara, tetapi pada upaya untuk memberikan umat Kristen kebebasan dalam beribadah dan memperkembangkan kehidupan keagamaan mereka. Kedua upaya ini akan terwujud sebagaimana diharapkan apabila pemerintah maupun tokoh-tokoh agama mampu menjalankan fungsinya dengan mengadakan sosialisasi peraturan bersama dua menteri kepada masyarakat. Di samping itu, mengadakan dialog-dialog yang arahnya bukan pada mempertentangkan doktrin atau ajaran siapa yang benar tetapi lebih pada menggali nilai-nilai Islam dan Kristiani yang dapat diterima bersama karena diyakini dapat menciptakan keamanan. Selain itu, perlu diadakan kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan yang sifatnya melibatkan semua unsur umat beragama. Pada prinsipnya upaya yang dilakukan pemerintah desa dengan melibatkan umat Kristen telah berada pada jalur yang benar, hanya saja perlu dikemas model yang lebih baik misalnya soal penggunaan jilbab. Pemerintah desa harus berani memberikan kesempatan kepada umat Kristen untuk tidak memaksakan mereka menggunakan jilbab.